

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LUWU

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab.Luwu Tahun 2025 disusun. Sebagaimana Rencana Kerja tahun-tahun yang lalu, Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini juga masih menyimpan banyak kekurangan.

Oleh karena itu, Rancangan Awal Rencana kerja yang disusun dalam Dokumen ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab.Luwu, serta mitra terkait lintas sector dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab.Luwu termasuk masyarakat umum, Lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah social masyarakat.

Akhirnya, terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Luwu Tahun Anggaran 2025 ini hingga selesai.

Belopa,
Kepala Dinas

2024

Dra.Hj.St.HIDAYA MADE

Pngkt :Pembina TK.I

Nip : 19680808 199710 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Luwu.....	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	59
3.3 Program dan Kegiatan.....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	78
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023 DP3A.....	12
Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	19
Tabel T-C.30 Analisis Pencapaian Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3A.....	32
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	38
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Luwu Tahun 2005-2025, maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah membentuk Kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.

Dengan kedudukan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagaimana yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 46 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka diperlukan pengukuran kinerja secara obyektif sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan merupakan suatu pola penyelenggaraan tugas dan fungsi yang proporsional dan berkesinambungan dalam menjawab tantangan organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu berupaya menjabarkan dan menguraikan kegiatan-kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang langsung dilaksanakan dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan Rencana kerja untuk memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh sebagai upaya menyiapkan Kemandirian Masyarakat Kabupaten Luwu dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2025 memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah, rencana kegiatan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Disadari bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus berjalan optimal dan berhasil, maka optimalisasi sumber daya manusia (*man*), keuangan (*money*), peralatan dan sarana prasarana (*machine*) serta pengorganisasian (*manajemen*) menjadi kebutuhan organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Rencana Kerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam buku ini akan memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan rencana capaian indikator makro dan kinerja pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2025. Keberhasilan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Luwu mengacu pada upaya mengatur peran serta perempuan sebagai perwujudan perempuan dan anak Luwu yang mandiri, sehat dan sejahtera.

Atas pertimbangan tersebut di atas, penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu sudah harus mempertimbangkan seluruh potensi dan permasalahan yang ada, terutama pada aspek yang bersifat khusus dan mendesak. Untuk itu, penetapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan harus jelas dan terukur

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renja DP3A) Kabupaten Luwu tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan penaggulangan kemiskinan sebagaimana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;



16. KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kab. Luwu periode 2019 – 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Luwu tahun 2021 nomor 6 tahun 2022 (berita daerah Kabupaten Luwu tahun 2021 nomor 67);
21. Peraturan Bupati Luwu Nomor 46 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu nomor 81 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 sampai 2026.
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. **Maksud** : Penyusunan rencana kerja adalah untuk memberikan landasan dalam menyusun program kebijakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dalam menentukan plafon anggaran sementara.
2. **Tujuan** : Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah sesuai garis besar isi dokumen sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perancangan dan penganggaran Perangkat Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- c. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

- d. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- e. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah; dan
- f. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
- d. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31.

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat Daerah Kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Sajikan table T-C 32

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

a. Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian NSPK dan SPM,
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan daerah terisolir,
 - Dsb.
- 2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan apasaja yang tersebar keberbagai kawasan dan(apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- 3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu idnikatif, maupun kombinasi keduanya.
- 4) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian , baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal documen, nama oerangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Pearngkat Daerah, serta cap

pemerintah daerah yang bersangkutan.

SINGKATAN-SINGKATAN

DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

PUG (Pengarusutamaan Gender)

IDG (Indek Pemberdayaan Gender)

IPG (Indeks Pembangunan Gender)

HLS (Harapan Lama Sekolah)

TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

KtA (Kekerasan terhadap Anak)

KtP (Kekerasan terhadap Perempuan)

PHP (Perlindungan Hak Perempuan)

TPPP (Tindak Pidana Perdagangan Perempuan)

KdRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga).



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renja Perangkat Daerah

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan:

1. **Menentukan apa yang akan dievaluasi.** Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya
2. **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.** Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan *terlebih* dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.
3. **Pengumpulan data.** Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
4. **Pengolahan dan analisis data.** Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara Fakta dan harapan/rencana untuk menghasilkan gap. Besar gap akan disesuaikan dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.
5. **Pelaporan hasil evaluasi.** Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis .

Berkaitan dengan Evaluasi renja DP3A Kab.luwu Tahun 2023 yang mempertimbangkan bahwa Renja DP3A Kab.luwu Tahun 2025 merupakan Renja Tahun ke enam dalam periode Renstra 2019-2024 yang telah di selaraskan dengan Rencana



Strategis Tahun 2025-2026, maka berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017, pengisian Tabel III.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah DP3A Kab.Luwu s/d tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renja Perangkat Daerah DP3A Kab.luwu Tahun 2024.

Sebagai bahan evaluasi rencana kerja yang dilakukan adalah dokumen Program dan Kegiatan yang ada pada tahun 2023. Hasil dari Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Tahun 2023 memperlihatkan bahwa dari 7 (tujuh) Program , 17 (tujuh belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan yang dilaksanakan umumnya telah mencapai sasaran dengan tingkat capaian realisasi hampir rata– rata pencapaian mendekati 100%, dari target yang telah ditentukan. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi/memenuhi target yang direncanakan dapat disajikan/dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	NOMOR KONTRAK	REALISASI				TARGET KINERJA OUTPUT	TARGET KINERJA OUTPUT	KET/LOKASI
					KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp.)	FISIK			
					Rp.	%		%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.524.678.521			2.495.851.368	98,86%		100%			Belopa
	Cakupan Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
2.08.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	21.071.200			20.945.364	99,40%		100%			Belopa
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.118.000	Pendapatan bagi hasil pajak		18.992.314	99,34%	-	100%	2 Dok	100%	Belopa
2.08.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.953.200	Pendapatan bagi hasil pajak		1.953.050	99,99%	-	100%	4 Lap	100%	Belopa
2.08.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2.023.602.971	Pendapatan bagi hasil pajak		2.005.810.749	99,12%		100%			
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1.906.542.971	Pendapatan bagi hasil pajak	0	1.888.750.749	99,07%	-	100%	300 OB	100%	Belopa
2.08.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	117.060.000	Pendapatan bagi hasil pajak	0	117.060.000	100%	-	100%	1 Dok	100%	Belopa



2.08.01.2.03	Administrsi Brang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	7.185.600	Pendapat an bagi hasil pajak		7.185.600	100%	-	100%	-	-	Belopa
2.08.01.2.03.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah pad SKPD	7.185.600	Pendapat an bagi hasil pajak		7.185.600	100%	-	100%	2 Lap	100%	Belopa
2.08.01.2.04	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	-			-	-	-	-	-	-	
2.08.01.2.03.01	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	-			-	-	-	-	-	-	
2.08.01.2.05	Administrasi umum Perangkat Daerah	186.741.800	Pendapat an bagi hasil pajak		178.742.650	95,72%		100%	0	100%	Belopa
2.08.01.2.05.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	Pendapat an bagi hasil pajak		10.000.000	100%	-	100%	1 Paket	100%	Belopa
2.08.01.2.05.02	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-			-	-		-	-	-	
2.08.01.2.05.03	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.500.000	Pendapat an bagi hasil pajak		3.461.600	46,15%		100%	10 Dok	100%	Belopa
2.08.01.2.05.04	Penyediaan bahan/material	11.712.800	Pendapat an bagi hasil pajak		11.550.950	98,62%		100%	19 Paket	100%	Belopa
2.08.01.2.05.05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.529.000	Pendapat an bagi hasil pajak		141.730.100	97,39%	-	100%	46 Lap	100%	Belopa
2.08.01.2.05.06	Dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	12.000.000	Pendapat an bagi hasil pajak		12.000.000	100%		100%	1 Dok	100%	Belopa
2.08.01.2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penuunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	-			0%		0%		0%	Belopa



2.08.01.2.06.01	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	0	-			0%		0%		0%	Belopa
2.08.01.2.07	<i>Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	259.611.400	Pendapat an bagi hasil pajak		257.034.455	99,01%		100%		100%	Belopa
2.08.01.2.07.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	25.200.000	Pendapat an bagi hasil pajak		25.200.000	100%		100%	1 Lap	100%	Belopa
2.08.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.611.400	Pendapat an bagi hasil pajak		35.034.455	93,15%		100%	1 Lap	100%	Belopa
2.08.01.2.07.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	196.800.000	Pendapat an bagi hasil pajak		196.800.000	100%		100%	1 Lap	100%	Belopa
2.08.01.2.08	<i>Pemeliharaan barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	26.465.550	Pendapat an bagi hasil pajak		26.132.550	98,74%		100%		100%	Belopa
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Dinas Operasioanl atau lapangan	26.465.550	Pendapat an bagi hasil pajak		26.132.550	98,74%	-	100%	3 Unit	100%	Belopa
2.08.02	<i>Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</i>	21.315.660	Pendapat an bagi hasil pajak		21.310.860	99,98%		100%		100%	Belopa
2.08.02.2.01	<i>Pelebagaan Pengurus Utamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Keweenaangan Kabupaten/Kota</i>	21.315.660	Pendapat an bagi hasil pajak		21.310.860	99,98%		100%		100%	Belopa



2.08.02.2.01.01	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	21.315.660	Pendapat an bagi hasil pajak		21.315.660	99,98%		100%	30 Opd	100%	Belopa
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-		-		-	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	-			-	-		-	-	-	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	100.755.000	Pendapat an bagi hasil pajak		45.587.000	45,25%		100%		100%	Belopa
2.08.03.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	17.450.000	Pendapat an bagi hasil pajak		17.450.000	100%		100%		100%	Belopa
2.08.03.2.01.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan dan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/Kota	17.450.000	Pendapat an bagi hasil pajak		17.450.000	100%		100%	1 Dok	100%	Belopa
2.08.03.2.01	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	22.490.000	Pendapat an bagi hasil pajak		14.690.00	65,32%		100%		100%	Belopa



2.08.03.2.01.01	Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.490.000	Pendapatan bagi hasil pajak		14.690.000	65,32%		100%	15 Layanan	100%	Belopa
2.08.03.2.03	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.815.000	Pendapatan bagi hasil pajak		13.447.000	22,11%		100%	0	100%	Belopa
2.08.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.815.000	Pendapatan bagi hasil pajak		13.447.000	22,11%		100%	3 Org	100%	Belopa
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	19.505.600	Pendapatan bagi hasil pajak		19.481.600	99,88%		100%		100%	Belopa
2.08.05.2.01	Penyajian Dan Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Kewenangan Kabupaten/Kota	19.505.600	Pendapatan bagi hasil pajak		19.481.600	99,88%		100%	1 dokumen	0%	Belopa
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	15.010.600	Pendapatan bagi hasil pajak		14.845.400	98,90%		100%		100%	Belopa
2.08.06.2.01	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.010.600	Pendapatan bagi hasil pajak		14.845.400	98,90%		100%		100%	Belopa



2.08.06.2.01.01	Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.010.600	Pendapat an bagi hasil pajak		14.845.400	98,90%		100%	1 Dok	100%	Belopa
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	338.045.000	Pendapat an bagi hasil pajak		172.332.200	50,98%		66,67%		100%	Belopa
2.08.07.2.01	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kotaa</i>	92.250.000	Pendapat an bagi hasil pajak		85.350.000	92,52%		100%		100%	Belopa
2.08.07.2.01.01	Koordinasi Dan Singkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten/Kota	92.250.000	Pendapat an bagi hasil pajak		85.350.000	92,52%		100%	1 Dok	100%	Belopa
2.08.07.2.02	<i>Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kotaa</i>	232.014.000	Pendapat an bagi hasil pajak		86.982.200	37,49%		100%		100%	Belopa
2.08.07.2.01.01	Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	232.014.000	Pendapat an bagi hasil pajak		86.982.200	37,49%		100%	38 Layanan	100%	Belopa
2.08.07.2.03	<i>Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah</i>	13.781.000	Pendapat an bagi hasil pajak		0	0%		0%		0%	Belopa



	Kabupaten/Kotaa										
2.08.07.2.03.02	Koordinasi Dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah Kabupaten/Kota	13.781.000	Pendapat an bagi hasil pajak		-	0%		0%	1 Dok	0%	Belopa
JUMLAH		3.019.310.381			2.769.408.428	99%		99%		100%	Belopa



Dari tabel realisasi program dan kegiatan diatas , sudah bisa kita lihat bahwa ada sebagian kegiatan yang belum memenuhi target kinerja disebabkan beberpa faktor. Maka bukan kesalahan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh perangkat daerah, melainkan karena adanya kebijakan daerah untuk mengalokasikan pagu anggaran yang bersifat teknis kegiatan bukan untuk kegiatan seperti sosialisasi dan sejenisnya, selain itu adanya rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah yang lebih mendesak ,sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang mempunyai pendorong untuk meningkatkan kinerja program menjadi berkurang. Berikut tabel tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kab. Luwu sebagai berikut:



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu Kab. Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
					BIDANG URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	02	08	01		PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Cakupan ketersediaan penunjang urusan pemerintahan daerah								

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	08	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	
	2	08	01	02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 laporan	4 laporan	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1325 OB	312 OB	300 OB	300 OB	100%	300 OB	300 OB	



2	08	01	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Jumlah Orang yang disediakan honorariumnya dalam melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	490 OB	na	1 Dokumen dan 72 OB	1 Dokumen dan 72 OB	na	1 Dokumen 132 OB	1 Dokumen 132 OB	
2	08	01	2.02	03	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang milik Daerah pada SKPD	15 Dokumen	na	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	2 Laporan	
2	08	01	2.02	04	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah jasa pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	5 Orang	2 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0 Orang	
2	08	01	2.02	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	4 paket	4 paket	
2	08	01	2.02	06	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah jenis penyediaan bahan logistic kantor	10 Jenis	4 jenis	0 jenis	0 jenis	0%	na	Na	
2	08	01	2.02	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 jenis	3 jenis	0 jenis	0 jenis	0%	na	Na	
2	08	01	2.02	07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40 jenis	3 jenis	10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	5 Dok	

2	08	01	2.02	08	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan	75 jenis	25 jenis	19 pkt	19 pkt	100%	19 pkt	19 pkt	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program ssdan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	01	2.02	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlaj Perlawanan Dinas Luar dan Dalam Daerah yang Dilaksanakan	315 kali/tahun	162 OK	46 Laporan	46 Laporan	100%	46 Laporan	46 Laporan	
2	08	01	2.02	10	Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Jumlah jenis Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	1 unit	na	0 unit	0 unit	0%	na	na	
2	08	01	2.02	11	Penyedia jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang disediakan Jumlah Laporan yang disediakan	40 OB	1500 OB	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	
2	08	01	2.02	12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 bulan	12 bulan	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	

2	08	01	2.02	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1500 OB	408 OB	1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	1 Lap	
2	08	01	2.02	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasioanl atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan DinasOperasioanl atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	08	02			PROGRAM : PENGURUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
2	08	02	2	01	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan	180 Orang	40 Orang	30 OPD	30 OPD	100%	30 OPD	30 OPD	

						Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangun Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan								
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	02	2	02	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Pemangku Kepentingan (Sesuai Kelompok Sasaran) yang Terlibat dalam Sosialisasi PUG Politik , Sosial, Hukum dan Ekonomi	200 org	Na	0 orang	0 orng	0%	0 orng	0 Orng	
2	08	02	2	03	Advokasi Kebijakan dan	Jumlah Lembaga Penvedia	6 lembaga	na	0 orang/2	0 orng/2	100%	na	na	

					Pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Jumlah Pemangku Kepentingan (Sesuai Kelompok Sasaran) yang Terlibat dalam Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan			lembaga	lembaga				
2	08	02	2	04	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	26 orng	Na	0 orng	0 orng	100 %	0 Orang	0 Orang	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangka t daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2	08	03	2	01	Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan kebijakan , program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan kewenangan Kab/kota	5 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	

2	08	03	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah rapat dalam Rangka Koordinasi dan Sinkronisasi	20 kali/tahun	2 kali	15 Layanan	15 Layanan	100%	15 Layanan	15 Layanan	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Peangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA									
2	08	04	2	01	Pelaksanaan Komunikasi , Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kab/kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	12 Kegiatan	2 Keg	0 Keg	0 Keg	100%	0 Keg	0 Keg	
2	08	04	2	02	Advokasi Kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	62 Keluarga	15 keluarga	0 keluarga	0 keluarga	100%	0 Keluarga	0 Keluarga	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK									
2	08	05	2	01	Penyajian dan pemamfaatan data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyajian dan pemamfaatan data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sistem/aplikasi yang dimanfaatkan dan disediakan	2 dokuemn dan 1 aplikasi	na	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dok	1 Dok	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024)	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)									
2	08	06	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang terlibat dalam pendampingan peningkatan kualitas hidup Anak dan Jumlah dokumen yang disediakan	55 anak	10anak	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	
Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	08	06			PROGRAM PERLINDUNGA N KHUSUS ANAK									
2	08	07	2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab.Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi yang disediakan	1 Dokumen dan 9 Orng	2 orng	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	
2	08	07	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab.Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang disediakan	1 Dokumen dan 9 Orng	2 orng	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	
2	08	07	2	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Dokumen dan 9 Orng	2 orng	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu telah mengidentifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 23 Kecamatan .Tahun 2022 sebanyak 45 kasus, dan tahun 2023 naik menjadi 53 kasus kasus.ini menunjukkan ada peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di rentang Tahun 2022-2023 dan Semua kasus tersebut sudah dilakukan penanganan secara terpadu dan konfresensif.

Gambaran mengenai analisis pencapaian kinerja DP3A Kab. dapat dilihat pada **Tabel TC.30** dibawah ini :

Tabel T-C.30
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30	30	2,94	3,24	3,56	3,92	0,26	0,25	3,24	3,56	0,21	0,0-5	0,15	3,92	
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	25	25	6,94	7,63	8,40	9,24	75,78	78,91	7,63	8,40	78,91	27,27	6,26	9,24	
3	Rasio KDRT	0,01	0,01	0,001	0,001	0,001	0,001	0,00004	0,00001	0,001	0,001	0,00001	0,00002	0,00004	0,0001	
4	Persentase jumlah tenaga kerja Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	100	100	60,5	65	65	65	45,5	45,5	65	28,1	28,1	28,1	65	65	
7	Persentase ARG dalam APBD	12,55	12,55	12,55	12,55	16,6	12,55	12,55	15,18	15,18	15,18	15,18	16,6	16,6	16,6	
8	Persentase perempuan di lembaga legislatif	30	30	12,55	13,80	15,18	16,70	0,057	0,057	13,80	15,18	0,057	0,057	0,029	16,70	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	55	55	55	55	50	50	55	55	55	50	0,68	0,68	0,68	0,68	
10	Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25	30	30	30	
11	Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	
12	Persentase perempuan penyandang disabilitas Perempuan.	100	100	50	75	50	50	50	50	75	50	0	0	0	0	
13	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	100	100	50	75	75	75	50	50	75	75	80	80	80	80	
14	Rasio perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	0,01	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0,0002	0,023	0,0002	0,0001	0,0001	



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
15	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada Situasi bencana	0	55	55	55	50	50	55	55	55	50	0	0	0	0	
16	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada Situasi konflik	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	
17	Persentase buruh migrant perempuan bermasalah yang memperoleh Pelayanan	0	75	75	75	75	75	75	75	75	75	0	0	0	0	
18	Persentase korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai Standar	100	100	50	75	50	50	50	50	75	50	0,008	0,014	0,004	0,004	
19	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) Yang aktif	100	100	50	75	75	75	50	50	75	75	75	75	100	100	
20	Persentase pusat pelayanan	100	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	100	100	



	keluarga (PUSPAGA) sesuai Standar															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dari **tabel TC-30** diatas dapat dijelaskan mengenai hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender

Pencapaian Peningkatan Pengarusutamaan Gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Kab.Luwu menunjukkan peningkatan yang cukup baik yaitu pada tahun 2023 mencapai 92,79 % sama dengan tahun 2022 mencapai 92,79%.Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kab Luwu masih berfluktuatif di bawah IDG Provinsi Sulawesi Selatan , dimana pada tahun 2023 IDG Kab.Luwu mencapai 55,34% meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan IDG Provinsi Sulawesi Selatan yakni 75,24%.

2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak

Perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diukur dengan beberapa indikator, dimana Rasio kekerasan terhadap perempuan dalam rentang tahun 2019 s/d 2023 ada penurunan rasio, dimana pada tahun 2019 Rasionya mencapai 0,07 sedangkan pada tahun 2020 2021 rasionya mencapai 0,01 dan tahun 2022 rasionya mengalami kenaikan yaitu 0,04 dan tahun 2023 mencapai 0,002 ada penurunan dari tahun 2022 ke 2023,walaupun rasio kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya sesuai target yang diinginkan, namun demikian Dari unit P2TP2A selaku Sub Pelayanan tetap optimis dalam penanganan pengaduan Kasus kekerasan baik anak maupun perempuan dalam upaya menurunkan rasio kekerasan yang diinginkan, dan selalu bersinergi/koordinasi dengan penegak hukum lainnya baik Polres maupun Kejaksaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Meningkatkan pemenuhan Hak dan perlindungan Khusus anak

Dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam Lingkup pemerintah Kab.luwu sangat dibutuhkan . Sedangkan dari internal DP3A sendiri yakni menyajikan dua Informasi dalam mendukung pemenuhan Hak dan perlindungan khusus anak yaitu Aplikasi SIGA dan SIMFONI, Ini menunjukkan bahwa ada kesempatan dalam meraih penghargaan Kabupaten layak anak dan APE, karena salah satu Indikator KLA adalah penerapan Informasi SIGA dan SIMFONI.Sedangkan dari segi kasus Kekerasan baik itu KDRT, Ktp (Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan (TPPP) terus dilakukan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, kalau melihat dari data yang ada dimana Kasus kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) pada tahun 2023 hanya ada 4 dibandingkan pada tahun 2019 yakni 8 kasus, sedangkan KtP dan TPPP 0 kasus.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Implementasi dari permasalahan adalah ditemukan dan dikenalnya rumusan kebijakan yang tepat untuk menghasilkan rumusan dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu hasil capaian kinerja DP3A periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektifitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisa terhadap tugas dan fungsi serta kinerja masa lalu dapat dirumuskan permasalahan pokok DP3A Kabupaten Luwu adalah “**Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak**”.

Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)
2. Masih Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Belum meningkatnya perlindungan perempuan dan ketersediaan sarana/prasarana umum ramah anak.

Hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan DP3A kedepan yang disempurnakan oleh evaluasi periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian yang terkait.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Seluruh program-program strategis di DP3A baik yang sifatnya program pusat, provinsi, maupun kabupaten termuat secara lengkap di dalam Renstra Perubahan DP3A 2019-2024, Dimana telah di sesuaikan ke Renstra 2025-2026 .haltersebut dilakukan (direncanakan) untuk menjawab seluruh kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun demikian berdasarkan pertimbangan dari tim penyusun anggaran tingkat kabupaten luwu maka program-program dan kegiatan tersebut hanya sebagian kecil diakomodir di dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Disadari bahwa dalam perkembangan dan penyusunan perencanaan dan anggaran tidak semua sejalan dengan yang direncanakan baik program maupun pendanaan sehingga kegiatan tersebut disinergikan dengan renstra dan renja walaupun secara nomenklatur, program tersebut adalah program yang baru akan tetapi tidak mengurangi nilai, tugas, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lembar.....dari.....

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA					
A.	KEGIATAN : PERENCANAAN , PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					KEGIATAN : PERENCANAAN , PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab.Luwu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	3 Dok	26.306.000	Perencanaan ,penganggar an, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	Kab.Luwu	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	3 Dok	26.306.000	
2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Kab.Luwu	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	3 dok	26.306.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab.Luwu	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	3 dok	26.306.000	
3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1dokumen	0	

4	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1dokumen	0	
5	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0	
6	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1dokumen	0	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Luwu	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0	
7	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Luwu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 laporan	0	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab.Luwu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	1 laporan	0	
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok 4 laporan	0	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok 4 laporan	0	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Inikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.	KEGIATAN :ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					KEGIATAN :ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
9	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab.Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	2.220.193.865	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab.Luwu	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi keuangan secara tepat waktu	100 persen	2.220.193.865	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Luwu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 orang/bulan	2.100.673.865	Penyediaan Gajidan TunjanganASN	Kab.Luwu	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 orang/bulan	2.100.673.865	
11	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	119.520.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	119.520.000	
12	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab.luwu	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dukumen	0	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Kab.luwu	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1Dukumen	0	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C.	KEGIATAN : ADMINISTRASI BMD PADA PERANGKAT DAERAH					KEGIATAN : ADMINISTRASI BMD PADA PERANGKAT DAERAH					
13	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.176.460.	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.176.460.	
14	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik daerah	2 Laporan	7.176.460.	Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik daerah	2 Laporan	7.176.460.	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D.	KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH					
15	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Luwu	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja	100 persen	22.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab.Luwu	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja	100 persen	22.500.000	
16	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Luwu	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut	1 paket	0	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Luwu	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut	1 paket	0	
17	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Luwu	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	0	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kab.Luwu	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	0	
18	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kab.Luwu	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	5 orang	22.500.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kab.Luwu	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	0 orang	22.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.	KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH					
19	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Luwu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	66.035.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Luwu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 paket	66.035.000	
20	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab.Luwu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 paket	0	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab.Luwu	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 paket	0	
21	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab.Luwu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0 paket	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab.Luwu	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	0 paket	0	
22	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab.Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 jenis	0	
23	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Luwu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	3.750.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Luwu	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	3.750.000	
24	Penyediaan bahan/material	Kab.Luwu	Jumlah paket bahan material yang disediakan	19 paket	11.702.880	Penyediaan bahan/material	Kab.Luwu	Jumlah paket bahan material yang disediakan	19 paket	11.702.880	

25	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Luwu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab.Luwu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 laporan	0	
26	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	184.308.500	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	184.308.500	
27	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	12.000.000	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	4 dokumen	12.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguI ndikatif (Rp.000)	Progra m/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F.	KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					KEGIATAN : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
28	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Luwu	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Luwu	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	0 unit	0	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	PaguI ndikatif (Rp.000)	Progra m/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G.	KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
29	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	2 laporan	16.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	2 laporan	16.800.000	
30	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air	1 laporan	85.765.000	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air	1 laporan	85.765.000	



			dan Listrik yang disediakan			air dan listrik		dan Listrik yang disediakan			
31	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	171.600.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab.Luwu	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	171.600.000	

H.	KEGIATAN :PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					KEGIATAN :PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
32	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab.Luwu	Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan diayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	43.921.350	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab.Luwu	Jumlah unit kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan diayarkan pajak dan perizinannya	3 unit	43.921.350	
33	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Luwu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	5.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab.Luwu	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	5.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	PROGRAM: PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					PROGRAM: PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
I.	KEGIATAN : PELEMBAGAAN PUG PADA LEMBAGA PEMERINTAH					KEGIATAN : PELEMBAGAAN PUG PADA LEMBAGA PEMERINTAH					
34	Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan pelembagaan PUG pada lembaga	0 persen	0	Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan pelembagaan PUG pada lembaga	0 persen	0	
35	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Kab.Luwu	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender(PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender(PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten	Kab.Luwu	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	
37	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Luwu	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan	0 perangkat daerah	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab .Luwu	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi kebijakan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan	0 perangkat daerah	0	



			Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive Gender (PPRG) kewenangan kabupaten/Kota					Gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsive Gender (PPRG) kewenangan kabupaten/Kota			
38	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Luwu	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	80 Org	50.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Luwu	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	80 Org	50.000.000	
J.	KEGIATAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN					KEGIATAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
39	Sosialisasi dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	Sosialisasi dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di Bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota			
40	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan Ekonomi	Kab. Luwu	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kabupaten/Kota	5 organisasi	84.009.470	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan Ekonomi	Kab. Luwu	Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kabupaten/Kota	5 organisasi	84.009.470	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K.	KEGIATAN: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA					KEGIATAN: PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA					
41	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota	Kab Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	0	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota	Kab Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	0	
42	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan pendampingan	0 lembaga	0	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan pendampingan	0 lembaga	0	
43	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan PP Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyediaan layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah rapat Koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan PP Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	0	

44	Pengembangan Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	0 dokumen	0	Pengembangan Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	0 dokumen	0	
----	--	-----------	--	-----------	---	--	-----------	--	-----------	---	--

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	PROGRAM: PERLINDUNGAN PEREMPUAN					PROGRAM: PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
L.	KEGIATAN: PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN: PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA					
45	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten	0 persen	0	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten	0 persen	0	
46	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan kewenangan kabupaten/kota	0 dok	0	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan kewenangan	1 dok	50.000.000	

								kabupaten/kota kewenangan kabupaten/kota				
47	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	58 OPD	100.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	58 OPD	100.000.000		
II	KEGIATAN: PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA				KEGIATAN: PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA							
48	Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten yang dapatkan layanan pengaduan	15 Org	20.000.000	Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten yang dapatkan layanan pengaduan	15 Org	20.000.000		
49	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	18 layanan	0	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan	18 layanan	31.540.000		



								korban kekerasan kewenangan kab/kota			
50	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban kekerasan kab/kotayang mendapat peningkatan kapasitas	5 Org	0	Peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah SDM Lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kotayang mendapat peningkatan kapasitas	5 Org	60.815.000	

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Inikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	PROGRAM:PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
M.	KEGIATAN:PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA					KEGIATAN:PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KAB/KOTA					
51	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penuyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender(KG) dan hak Anak	100 persen	0	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penuyelenggara n peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender(KG) dan hak Anak	100 persen	0	

52	Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah komunikasi, informasi, edukasi(KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	0 dokumen	0	Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah komunikasi, informasi, edukasi(KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	0 dokumen	0	
53	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	0	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	0	
54	Advokasi kebijakan dan pendampingan untu mewujudkan KG dan perlindungan Anak kewenangan kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk ,mewujudkan KG dan perlindungan anak Kewenangan kab/Kota	34 OPD	50.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan untu mewujudkan KG dan perlindungan Anak kewenangan kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk ,mewujudkan KG dan perlindungan anak Kewenangan kab/Kota	34 OPD	50.000.000	



No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dan (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	PROGRAM:PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					PROGRAM:PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
N	KEGIATAN : PENGUMPULAN, PENGOLAHAN , DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA					KEGIATAN : PENGUMPULAN, PENGOLAHAN , DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA					
55	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan system data Gender dan Anak	0 persen	0	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data Gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan system data Gender dan Anak	0 persen	0	
56	Penyediaan data Gender dan anak dikewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen data Gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	0 dokumen	0	Penyediaan data Gender dan anak dikewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen data Gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	0 dokumen	0	
57	Penyajian dan pemanfaatan data Gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	30.000.000	Penyajian dan pemanfaatan data Gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen penyajian dan pemanfaatan Data Gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	30.000.000	

VI. PROGRAM:PEMENUHAN HAK ANAK						PROGRAM:PEMENUHAN HAK ANAK					
O. KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak						KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak					
58	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota		0	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota		0	
59	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pendampingan peningkatan kualiatas hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang 0 dokumen	0	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pendampingan peningkatan kualiatas hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang 0 dokume n	0	
i	KEGIATAN : PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH , NON PEMERINTAH , DAN DUNIAS USAHA, KEWENANGAN KAB/KOTA					KEGIATAN : PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH , NON PEMERINTAH , DAN DUNIAS USAHA, KEWENANGAN KAB/KOTA					
60	Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	0	Koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelembagaan pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	13.781.000	
J	KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KAB/KOTA					KEGIATAN : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan KAB/KOTA					



61	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas Hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	0	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas Hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	30.000.000	
----	--	-----------	--	-------	---	--	-----------	--	-------	------------	--

No.	Rancangan Awal RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PROGRAM: PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					PROGRAM: PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
P.	KEGIATAN : PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KAB/KOTA					KEGIATAN : PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KAB/KOTA					
62	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kab. Luwu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan/pencegahan KTA	546 Org	100.000.000	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kab. Luwu	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan/pencegahan KTA	546 Org	100.000.000	

61	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Kab/kota	Kab. Luwu	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat Kab/kota	1 Dok	0	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Kab/kota	Kab. Luwu	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat Kab/kota	1 Dok	100.000.000	
62	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/Kota	1 Dok	0	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/Kota	1 Dok	92.250.000	
Q.	KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					KEGIATAN : PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA					
63	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggaraan penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan kordinasi tingkat daerah kab/kota	0 persen	0	Penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Cakupan penyelenggara n penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan kordinasi tingkat daerah kab/kota	0 persen		0



63	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 orang	0	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Luwu	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 orang	0
R.	KEGIATAN : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KAB/KOTA					KEGIATAN : PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KAB/KOTA				
64	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	0 persen	0	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	0 persen	0
65	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota	Kab.lu wu	Jumlah kegiatan kerjasam antar lembaga penyedia layanan AMPK	0 kegiatan	0	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat Daerah kabupaten/kota	Kab.lu wu	Jumlah kegiatan kerjasam antar lembaga penyedia layanan AMPK	0 kegiatan	0



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam kegiatan musrenbang tingkat kecamatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah membentuk tim untuk menghadiri musrenbang tersebut namun demikian usulan program dan kegiatan baik dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke kabupaten tak ada satupun usulan yang masuk. Tetapi, tim dari DP3A yang mengikuti musrenbang tetap memaparkan program-program prioritas yang menjadi fungsi dari DP3A.

Tetapi di samping itu, perlu kita pahami bahwa program DP3A adalah unsur kinerja pemerintah bukan pelayanan dasar yang perlu mendapatkan perhatian dari sisi anggaran dan komitmen politik dari pengambil kebijakan dalam perjalanannya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebagai organisasi perangkat daerah. DP3A sudah melakukan berbagai upaya-upaya strategis untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu antara lain, dibuatnya regulasi berupa Perda tentang Pengarusutamaan gender (PUG), perlindungan perempuan, dan perlindungan anak serta peraturan bupati dan SK lainnya untuk menguraikan secara detail program-program yang dituangkan dalam perda tersebut di atas, di samping itu DP3A eksis dalam melaksanakan tugas PP dan PA yang berhadapan dengan hukum, pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan. Upaya-upaya strategis lainnya adalah:

1. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka mendapatkan penghargaan tertinggi dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (APE) dan pada tahun 2018 DP3A mendapatkan penghargaan APE kategori Madya dan penghargaan tersebut kembali didapatkan pada tahun 2021 dengan kategori yang sama.
2. Upaya mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA),
Pada tahun 2022, DP3A mendapatkan penghargaan KLA kategori pratama, ini menunjukkan bahwa DP3A konsisten dalam melaksanakan semua Program dan Kegiatan sebagai upaya dalam mendukung visi misi Bupati Luwu dalam meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) .

DP3A kabupaten luwu aktif membangun sinergi dengan instansi lainnya baik pemerintah maupun swasta dalam rangka penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pengarusutamaan dan perlindungan anak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi P-RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”

Telaahan terhadap kebijakan nasional yakni :

1. Telaahan renja kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3A Kaupaten Luwu mendukung pencapaian sasaran jangka menengah renja kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak RI yang termuat dalam sasaran jangka menengah renja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014-2019 sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
 - c. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - e. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak
 - f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- g. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama, kemasyarakatan, serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Telaahan renja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi Sulawesi Selatan

Selain renja kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI DP3A Kabupaten Luwu juga mensinergikan dan mendukung renja DP3A Provinsi Sul Sel terutama yang berkaitan dengan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
- c. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- d. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- e. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
- f. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
- g. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama, kemasyarakatan, serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core- competencies* untuk mencapai tujuandan sasaran kelembagaan.

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Luwu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu merujuk pada visi Kabupaten Luwu yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yaitu "**KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI**". Untuk terwujudnya visi tersebut, misi P- RPJMD yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu adalah misi ke pertama yaitu "**Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel**" dan misi ke Sembilan yaitu "**Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif**".

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan.

3.3 Program dan Kegiatan

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Tahun 2025, antara lain meliputi:

- a. Jumlah program dan kegiatan yaitu ada 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota**

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan
- Penatausahaan barang milik Daerah
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan bahan/material
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan, buaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, social, dan ekonomi
- Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan politik, Hukum, social dan ekonomi
- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab./kota

3) Program perlindungan perempuan

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup Daerah Kab/kota
- Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan kewenangan kab./kota
- Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/kota
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi

perempuan korban kekerasan kewenangan kab./kota

- Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/kota

4) Program peningkatan kualitas keluarga

- Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak kewenangan kab./kota

5) Program pengelolaan system data gender dan anak

- Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kab./kota
- Penyediaan Data Gender dan anak di kewenangan Kab/kota

6) Program pemenuhan hak anak (PHA)

- Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan kab./kota
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tk. Daerah kab./kota

7) Program perlindungan khusus anak

- Advokasi dan pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA
- Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Kab/kota
- Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota

- b. Penyebaran lokasi program dan kegiatan rata-rata dilaksanakan di Belopa Kabupaten Luwu, serta yang dilaksanakan di luar daerah luar provinsi yakni kegiatan festival penyelenggaraan Forum Anak Daerah baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Luwu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lembar.....dari.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL BELANJA OPERASI DAN MODAL								
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				3.322.988.913	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK			3.840.574.975
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.322.988.913				3.840.574.975
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan Ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Kab.Luwu	100%	2.892.779.144			100%	3.028.179.505
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	Kab.Luwu	100%	32.124.283				28.226.450
2.08.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja dan perubahan renja yang disusun	Kab.Luwu	3 dok	30.035.093	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		3 dok	26.306.000
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab.Luwu	1 dokumen	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 dok	0

2.08.01. 2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Luwu	1 dokumen	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 dokumen	0
2.08.01. 2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Luwu	1 dokumen	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 dokumen	0
2.08.01. 2.01.05	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab.Luwu	1 dokumen	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 dokumen	0
2.08.01. 2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	Kab.Luwu	1 laporan	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 laporan	0
2.08.01. 2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Luwu	5 laporan	2.089.190	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		5 laporan	1.920.450
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2. 02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Administrasi keuangan secara tepat waktu	Kab.Luwu	100 persen	2.208.553.865			100 persen	2.220.193.865
2.08.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Luwu	300 orang/bulan	2.100.673.865	DAU		300 orang/bulan	2.100.673.865

2.08.01. 2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Kab.Luwu	2 Dokumen 132 OB	107.880.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 Dokumen 132 OB	119.520.000
2.08.01. 2.02.03	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Kab.Luwu	2 dokumen	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 dokumen	0
2.08.01 .2.03	Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi BMD pada SKPD	Kab.Luwu	100%	7.133.980			100%	7.176.460
2.08.01. 2.03.01	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Kab.Luwu	2 laporan	7.133.980	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		2 laporan	7.176.460

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01 .2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan Predikat Kinerja	Kab.Luwu	100 persen	0			100 persen	77.700.000
2.08.01.2.0 4.01	Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut	Kab.Luwu	0 paket	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 paket	25.200.000
2.08.01.2.0 4.02	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab.Luwu	0 orang	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 orang	30.000.000

2.08.01.2.04.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kab.Luwu	0 orang	0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		5 orang	22.500.000
-----------------	--	--	----------	---------	---	------------------------------	--	---------	------------

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	Kab.Luwu	100%	274.724.411			100%	277.796.380
2.08.01.2.05.01	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu	7 paket	57.799.350	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		7 paket	66.035.000
2.08.01.2.05.02	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu	0 paket	0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		0 paket	0
2.08.01.2.05.03	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Luwu	0 paket	0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		0 paket	0
2.08.01.2.05.04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu	4 jenis	0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		0 jenis	0
2.08.01.2.05.05	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Luwu	10 Dok	4.000.000	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		10 Dok	3.750.000

2.08.01. 2.05.06	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Kab. Luwu	19 paket	11.662.061	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		19 paket	11.702.880
2.08.01. 2.05.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Luwu	0 laporan	0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		0 laporan	0
2.08.01. 2.05.08	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Luwu	25 Lap	189.263.000	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		25 Lap	184.308.500
2.08.01. 2.05.09	Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kab. Luwu	4 Dok	12.000.000	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		4 Dok	12.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01 .2.06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kab.Luwu	100 persen	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		100 persen	0
2.08.01 .2.06.0 1	Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang disediakan	Kab.Luwu	0 unit	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		0 unit	84.000.000
2.08.01 .2.07	Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab.Luwu	100%	304.633.220	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		100%	274.165.000



2.08.01. 2.07.0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Luwu	2 laporan	108.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		2 laporan	16.800.000
2.08.01.2. 07.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Kab.Luwu	1 laporan	58.633.220	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 laporan	85.765.000
2.08.01. 2.07.03	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab.Luwu	1 laporan	138.000.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		1 laporan	171.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.01. 2.06	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Kab.luwu	100%	65.609.385			100%	58.921.350
2.08.01. 2.06.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan diayakarkan pajak dan perizinannya	Kab.luwu	3 unit	60.369.385	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		2 unit	43.921.350
2.08.01. 2.06.02	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab.luwu	10 unit	5.240.000	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		10 unit	5.000.000

2.08.01. 2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.luwu	2 unit	0	PENDAPATAN BAKI HASIL PAJAK		2 unit	10.000.000
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender Persentase anggaran responsive Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	Kab.luwu	100% 0,37%	130.002.807			100% 0,40%	134.009.470
2.08.02.2.01	Pelembagaan PUG Pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Cakupan penyelenggaraan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah	Kab. Luwu	100%	50.002.696			100%	50.000.000
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Luwu	0 dokumen	0			0 dokumen	0
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	0 dokumen	0			0 dokumen	0
2.08.02.2.01.0003	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi kebijakan	Kab. Luwu	0 perangkat daerah	0			0 perangkat daerah	0
2.08.02.2.01.01	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Kab. Luwu	80 Org	50.002.696	PENDAPATAN BAKI HASIL PAJAK		80 Org	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Pen-ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02.2.02	Pemberdayaan perempuan, Bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persentase anggaran responsive Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	Kab.Luwu	100%	80.000.111			100%	84.009.470
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi dan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah pemangku kepentingan (sesuai kelompok sasaran) yang terlibat dalam sosialisasi PUG politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kab. Luwu	50 orang	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		50 orang	0
2.08.02.2.02.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan partisipasi Perempuan dan politik, hukum, social dan ekonomi	Jumlah organisasi Masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi Perempuan di bidang politik, hukum, social dan ekonomi kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	5 Organisasi	80.000.111	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		5 Organisasi	84.009.470
2.08.02.2.03	Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan.kab/kota	Cakupan penyelenggaraan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab.luwu	100%				100%	0
2.08.02.2.03.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota yang mendapat Advokasi dan	Kab.luwu		0				0



	Kabupaten/Kota	pendampingan							
--	----------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.02. 2.03.03	Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Kab. Luwu	0 kali 0 orang	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		0 kali 0 orang	0
2.08.02. 2.03.03	Pengembangan Komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Luwu	0 orang		0 orang			18.992.300
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	Kab. Luwu	24,09	119.930.520			24,09	262.355.000



2.08.03.2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk Perempuan)	Kab.Luwu	10,34 %	100.135.160			11,01 %	150.000.000
2.08.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab.Luwu	1 Dok	0			1 Dok	50.000.000
2.08.03.2.02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan Perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab.Luwu	58 OPD	100.135.160			58 opd	100.000.000
2.08.03.2.02	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Cakupan penyelenggaraan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Kab.Luwu	100%	19.795.360			100%	51.540.000
2.08.02.2.03.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kemenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Kab. Luwu	15 orang	19.795.360	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		15 orang	20.000.000

2.08.02. 2.03.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota Jumlah rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi	Kab. Luwu	15 layanan	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		15	31.540.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.03 2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk Perempuan)	Kab.Luwu	10,34%	0			11,01%	60.815.000
2.08.03 .2.03.0 1	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia layanan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan pendampingan penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten	Kab,Luwu	0 dokumen	0				31.540.000
2.08.03 .2.03.0 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	Kab. Luwu	5 orang	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		5 orang	60.815.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga	Kab. Luwu	80,01%	50.072.566	DAU		80,01%	50.000.000
2.08.04.2.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Dearah kabupaten	Cakupan penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak	Kab.Luwu	80,01%	50.072.566			80,01%	50.000.000
2.08.04.2.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/Kota	Kab.Luwu	36 OPD	50.072.566	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		36 OPD	50.000.000
2.08.04.2.02	Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah komunikasi, edukasi (KIE) kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	Kab.Luwu	0 dokumen	0			0 dokumen	0
2.08.04.2.02	Penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Penguatan dan pengembangan lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Kab.Luwu	100%	0	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK		100%	0

2.08.04. 2.02.1	Advokasi kebijakan dan pendampingan Pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan.Kuaitas Keluarga Tingk.daerah Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang diadvokasi dan dilakukan pendampingan Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat advokasi dan pendampingan	Kab. Luwu	15 keluarga 3 lembaga	0	PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK		15 keluarga 3 lembaga	0
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Dikelola dalam Sistem	Kab.Luwu	100%	30.203.676			100%	30.000.000
2.08.05.2.0 1	Pengumpulan ,pengolahan analisis dan Penyajian data Gender dan anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten	Cakupan penyelenggaraan sistem data gender dan anak	Kab.Luwu	100 %	30.203.676			100%	30.000.000
2.08.05. 2.01.01	Penyediaan data Gender dan anak dikewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen data Gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Kab. Luwu	1 dokumen	0			1 dokumen	0
2.08.05. 2.01.02	Penyajian dan pemamfaatan data Gender dan anak dalam kelembagaan data dikewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen penyajian dan pemamfaatan Data Gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota Jumlah sistem/aplikasi yang dimanfaatkan dan disediakan		1 dokumen	30.203.676	PENDAPATA N HASIL PAJAK		1 dokumen	30.000.000
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	Kab.Luwu	100%	0			100%	43.781.000
2.08.06 .2.01	Pelebagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	CakupanPenyelenggaraa n Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah , non pemerintah dan dunia usaha	Kab.Luwu	100%	0			100%	13.781.000

2.08.06. 2.02.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan PHA Kewenangan kab/Kota	Kab. Luwu	0 dokumen	0	PENDAPATAN HASIL PAJAK		I dokumen	13.781.000
2.08.06 .2.02	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/kota	Cakupan Penyelenggaraan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Kab.Luwu	100%	0			100%	30.000.000
2.08.06. 2.02.01	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dan pendampingan peningkatan kualiatas hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kulaitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Luwu	I dokumen	0	PENDAPATAN HASIL PAJAK		I dokumen	30.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prgram/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100% 100%	100.000.200			100% 100%	292.250.000

2.08.07.2.03.	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	Kab. Luwu	100%	100.000.200			100%	292.250.000
2.08.07.2.03.01	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu	Kab. Luwu	0 kegiatan	0			1 kegiatan	0
2.08.07.2.03.04	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan/pencegahan KTA	Kab. Luwu	546 Org	100.000.200	PENDAPATAN HASIL PAJAK		546 org	100.000.000
2.08.07.2.03.05	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di Tingkat Kab/Kota	Kab.Luwu	1 Dok	0			1 dok	100.000.000
2.08.07.2.03.06	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/Kota	Kab.Luwu	1 Dok	0			1 dok	92.250.000

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 yang telah diubah menjadi 2025-2026 yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan.

Dengan adanya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu diharapkan akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Tahun 2024, sangat tergantung kepada komitmen bersama seluruh komunitas Pegawai dalam mewujudkan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas demi tercapainya perempuan dan anak Luwu yang mandiri, sehat, sejahtera. Adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan tetap akan ditindak lanjuti pada tahun berikutnya dengan memprioritaskan program-program yang menjadi program prioritas.

5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 ini adalah :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) Kabupaten Luwu bertanggung jawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) renja DP3A.
2. Seluruh aparatur DP3A Kabupaten Luwu berkewajiban melaksanakan program- program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025
3. Sangat diharapkan konsistensi para pengguna mulai tahap perencanaan, pelaksanaan serta selanjutnya pada tahap implementasi, agar visi dan misi DP3A Kabupaten Luwu dapat dicapai secara bertahap
4. Renja Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam operasionalisasi kegiatan DP3A dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk kurun waktu tahun 2025, dalam pelaksanaannya diharapkan adanya saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya guna hasil program dan kegiatan



di waktu mendatang, serta dalam rangka peningkatan profesionalisme institusi DP3A Kabupaten Luwu

5. Rancangan akhir Renja DP3A Kab Luwu tahun 2025 merupakan upaya Dinas dalam mewujudkan RPJMD Pemerintah Kab.Luwu melalui penjabaran visi misi Bupati Luwu 2019-2024.
6. Renja Tahun 2025 ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2025.Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Apabila diperlukan perbaikan atau revisi terhadap renja pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi, kegiatan untuk melakukan revisi tersebut dapat dituangkan pada renja perubahan pada tahun berkenaan atau dilakukan revisi renstra jika pada kesempatan yang sama dilakukan revisi, P-RPJMD oleh alasan yang dibenarkan menurut pereturanperundang-undangan. Dengan rencana sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun renja dan penyusunan agenda kerja
2. Penyiapan data dan informasi
3. Review terhadap renja perangkat daerah
4. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan,semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya dan langkah kita. Amiin.

Belopa,
Kepala Dinas

2024

Dra.Hj.ST.HIDAYA MADE

Pngkt : Pembina TK.I

Nip : 19680808 199710 2 001

